

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PUNGUTAN DANA PKH DARI PERSPEKTIF SYARIAH
(Studi Kualitatif Di Kecamatan Cireunghas)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Akuntansi*

CHITRA NUR RISYANTI

20200070068



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
AGUSTUS 2024**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL :ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PUNGUTAN DANA PKH DARI PERSPEKTIF SYARIAH
(Studi Kualitatif di Kecamatan Cireunghas)

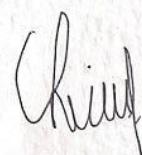
NAMA :CHITRA NUR RISYANTI

NIM :20200070068

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 20 Agustus 2024

Penulis



Chitra Nur Risyanti

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PUNGUTAN DANA PKH DARI PRESPEKTIF SYARIAH
(Studi Kualitatif di Kecamatan Cireunghas)
NAMA : CHITRA NUR RISYANTI
NIM : 20200070068

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 19 Agustus 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak.)

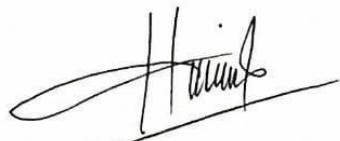
Sukabumi, 19 Agustus 2024

Pembimbing I,



Taofik Muhammad Gumelar SE, M.AK, CA, Ak
NIDN. 0421109402

Pembimbing II,



Irwan Hermawan, M.E
NIDN. 0428047904

Ketua Penguji,



Nurul Rusdiansyah, S. Akun M.Ak
NIDN. 0403089501

Ketua Program Studi Akuntansi,



Heliani, M.Ak
NIDN. 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA. Teddy Lesmana, M.H
NIDN. 0414058705

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pungutan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cireunghas dari perspektif syariah. Dalam pengelolaan dana publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan guna memastikan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat beberapa kendala seperti ketidaksesuaian data, kurangnya keterbukaan informasi kepada publik, dan lemahnya pengawasan dalam proses pungutan dana. Dari perspektif syariah, prinsip amanah sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan dana PKH, karena menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tahapan proses. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem informasi akuntansi yang lebih transparan dan berbasis syariah, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa dana PKH dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana PKH, Perspektif Syariah, Kecamatan Cireunghas

ABSTRACT

This research aims to analyze the level of transparency and accountability in collecting funds for the Family Hope Program (PKH) in Cireunghas District from a sharia perspective. In managing public funds, transparency and accountability are important aspects that must be considered to ensure public trust and program effectiveness. This research uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through in-depth interviews with related parties, field observations and document analysis. The research results show that although there have been efforts to increase transparency and accountability, there are still several obstacles such as data discrepancies, lack of information disclosure to the public, and weak supervision in the fund collection process. From a sharia perspective, the principle of trust is very relevant to apply in managing PKH funds, because it emphasizes the importance of responsibility, honesty and fairness at every stage of the process. This research recommends improving the accounting information system to be more transparent and sharia-based, as well as strengthening monitoring mechanisms to ensure that PKH funds are managed effectively and in accordance with sharia principles.

Keywords: Transparency, Accountability, PKH Funds, Sharia Perspective, Cireunghas District



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pungutan Dana PKH dari Perspektif Syariah (Studi Kualitatif di Kecamatan Cireunghas)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Kurniawan, ST., M.SI, MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. Bapak Anggy Praditha,S.Pd., M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi.
3. Kepada Ibu Heliani, SE., M.Ak_sebagai ketua program studi Akuntansi yang sudah mengesahkan penelitian ini.
4. Bapak Taofik M Gumelar SE, M.AK, CA, Ak_selaku Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra atas segala bimbingan, memberikan banyak waktu dan arahan yang telah diberikan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Irwan Hermawan, ME selaku Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh dosen dan staf pengajar di Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga selama masa studi.
4. Kepada pihak Kecamatan Cireunghas terutama pihak Program Keluarga Harapan yang telah memberikan izin penelitian ini dan bersedia terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Kepada Mama Yulianti orang yang sangat berjasa di kehidupan penulis, selaku ibu dari penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat, motivasi semangat dan selalu mendoakan tiada henti hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, *You are too special to express simply, I love you so much mom.* Terimakasi banyak mama.
6. Kepada Bapak Riswandi selaku Bapak dari penulis yang selalu memberikan semangat dan menjadi donatur selama perkuliahan, terimakasi atas kepercayaan dan dukungannya yang di berikan kepada penulis, *Live longer father, I love learning new things with you.*
7. Keluarga besar tercinta terutama kepada adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti, dan kepada nenek penulis yang selalu tulus mendoakan, berkat doa-doanya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan, kerjasama, dan semangat selama proses penulisan skripsi ini, terutama kepada teman terbaik penulis yaitu Shevira Azzahra terimakasi telah menjadi support system terbaik sejauh ini terimakasi telah menjadi telinga yang siap mendengar keluh kesah selama menjalani proses penulisan skripsi ini, dan terimakasi atas kebaikan, ketulusan yang di berikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada pemilik NIM 20200080235 terimakasi telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, mendahulukan kepentingan penulis, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril, terimakasi telah menjadi bagian dari perjalanan skripsi ini
10. Terakhir, Kepada saya sendiri, Chitra Nur Risyanti. Terimakasi sudah berjuang dan bertahan sejauh ini, Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai, terimakasi untuk tidak menyerah dalam hal apapun hal serumit apapun, selalu kuat dan mampu mencapai di titik ini, terima kasih telah mampu bangkit dari setiap kegagalan, Ketahanan mental dan

emosional yang telah dimiliki membantu melewati masa-masa sulit dan tetap fokus pada tujuan akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang

Sukabumi, 20 Agustus 2024

Penulis
Chitra Nur Risyanti



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chitra Nur Risyanti

NIM : 20200070068

Program Studi : Akuntansi

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUNGUTAN DANA
PKH DARI PERSPEKTIF SYARIAH (Studi Kualitatif Di Kecamatan
Cireunghas)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukabumi, 20 Agustus 2024

Penulis



(Chitra Nur Risyanti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENULIS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Secara Teoritis	6
1.5.2 Secara Praktis	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Penyaluran Dana.....	8
2.1.2 Transparansi.....	8
2.1.3 Prinsip syariah	9
2.1.4 Akuntabilitas.....	10
2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi	13
2.1.6 Program Keluarga Harapan (PKH)	15
2.1.7 Penelitian Terdahulu	20
2.1.8 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
1.1 Rancangan Penelitian.....	26
3.2 Kehadiran Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian	27

3.4 Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Analisis Data	28
3.7 Pengecekan Validitas Temuan	30
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Program Keluarga Harapan	32
4.2 Hasil Penelitian.....	38
4.3 Pembahasan Penelitian	48
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64
CURRICULUM VITAE	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	20
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir... 24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	69
Lampiran 2	69
Lampiran 3	70
Lampiran 4	70
Lampiran 5	71





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program keluarga harapan (PKH) telah menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dana yang di alokasikan untuk PKH memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, namun seiring dengan pentingnya peran PKH, tantangan dalam pengolahan dan akuntabilitas dana PKH semakin kompleks. Masyarakat, pemerintah, dan lembaga semakin menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengolahan dana public seperti PKH, ini berarti di perlukan system yang memungkinkan pelacakan dana secara jelas (kemensos, 2019).

Dalam konteks pengelolaan dana program keluarga harapan (PKH). Akuntabilitas, juga dikenal sebagai *accountability*, berarti perbuatan bertanggung jawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan; atau kadang-kadang disebut sebagai tanggung gugat. Dalam beberapa kamus, disinonimkan dengan tanggung jawab, pertimbangan, dan akuntansi (Echolas dan Shadily, 1997). "Kualitas atau *state of being accountable, liable, or responsible*" adalah definisi akuntabilitas menurut New International Dictionary (1996). akuntabilitas menuntut bahwa penggunaan dana tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai dengan tujuan yang di tetapkan, dan dalam konteks ini pendekatan prinsip syariah muncul sebagai sebuah alternatif yang menarik, prinsip prinsip syariah menekankan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum islam dalam pengolahan dana. Namun penerapan prinsip ini dalam konteks PKH memerlukan pemahaman yang mendalam dan system yang tepat (Rahma Febrianti, 2023)

Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM), dengan

tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan. Program ini telah berjalan sejak 2007 di bawah Kementerian Sosial dan dirancang sebagai pusat utama dalam strategi nasional untuk penanggulangan kemiskinan (Rapi Harahap, 2023). PKH berfungsi untuk menyatukan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial, serta menyediakan bantuan bersyarat yang fokus pada peningkatan kesehatan dan pendidikan anak.

Selain itu, PKH bertujuan mengurangi beban keluarga miskin dengan membantu mereka meningkatkan pendapatan dan mengakses layanan sosial dasar. Bantuan yang diberikan mencakup akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, makanan dan gizi, perawatan, serta pendampingan dan perlindungan sosial lainnya. Dengan demikian, PKH tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup mereka secara menyeluruh (Dinas Sosial, 2024).

Program ini memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, program ini berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. Pada PJP 2010–2014, target penerima dan alokasi dana PKH meningkat di atas baseline target perencanaan. Pelaksanaan PKH tahun 2016 mencapai 6 juta keluarga miskin dengan anggaran 10 triliun, penerima PKH tahun 2017 mencapai 6.228.810 keluarga dengan anggaran 11,5 triliun, penerima PKH tahun 2018 mencapai 10.000.232 KPM dengan anggaran 17,5 triliun, dan target penerima PKH tahun 2019 adalah 10 juta keluarga (kemensos, 2019).

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dengan prinsip syariah, suatu perspektif yang jarang diangkat dalam evaluasi program pemerintah. Dengan fokus pada Kecamatan Cireunghas, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas dalam penyaluran bantuan, sekaligus mengungkap dinamika lokal yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Integrasi aspek teknis dan etika ini memberikan dimensi baru dalam

evaluasi program sosial berbasis syariah.

Akan tetapi masalah yang terjadi pada objek penelitian terkait yang digunakan dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cireunghas telah menurunkan kepercayaan masyarakat. Salah satu isu utama adalah penyaluran yang seharusnya dilakukan secara non-tunai namun menjadi tunai (Siti F, 2023). Ini membuka peluang bagi terjadinya pemotongan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut laporan, kementerian social telah berusaha meningkatkan efektivitas penyaluran dana PKH melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) dan lembaga keuangan lainnya, namun masih ada tantangan dalam implementasi di lapangan. Penyaluran non tunai ini bertujuan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian dan memastikan dana di terima langsung oleh penerima, agar tidak ada risiko pemotongan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan sistem informasi akuntansi untuk dana Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial disalurkan secara efektif, tepat sasaran, dan transparan (Destian S, 2019). Hal ini menunjukan perlunya diteliti lebih lanjut untuk memastikan akuntabilitas dalam penyaluran dana PKH dan dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan, prosedur pencairan, dan prosedur penyaluran dana PKH sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Warga Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi mengaku mendapatkan pemotongan bansos sebesar Rp50 Ribu. Dalam laporan yang disesuaikan dari detik.com, seorang warga Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, melaporkan adanya pemotongan dana bantuan PKH. Ia menyatakan bahwa menerima bantuan sebesar Rp400 ribu, namun terjadi pemotongan sebesar Rp50 ribu oleh pihak yang memegang ATM. Sisa dana yang diterima sebesar Rp350 ribu, dengan potongan tambahan yang diduga akan diberikan kepada RT sebagai ongkos pengambilan, sehingga bersihnya sekitar Rp300 ribu (Siti F, 2023).

Fenomena kurang transparansi dalam verifikasi data penerima PKH mengacu pada situasi di mana data penerima bantuan yang tercatat dalam sistem

informasi akuntansi. Contohnya saat peneliti melakukan penelitian menemukan masalah baru yang di sebutkan oleh narasumber itu sendiri dan sudah dikatakan menjadi hal rumrah, dalam proses pendaftaran atau verifikasi penerima PKH, data yang dimasukkan ke dalam sistem mungkin berasal dari sumber yang tidak terverifikasi dengan baik, atau ada perubahan kondisi ekonomi penerima yang tidak tercatat secara tepat waktu (Fani D, 2023). Akibatnya, individu atau keluarga yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan tetap tercatat sebagai penerima, sementara yang benar-benar membutuhkan mungkin tidak terdaftar atau tidak mendapatkan bantuan yang layak.

Ketidak transparan ini bisa menimbulkan berbagai masalah, termasuk distribusi dana yang tidak tepat sasaran, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program PKH, dan tantangan dalam mencapai tujuan program untuk membantu keluarga miskin secara efektif fenomena ini di angkat dalam penelitian, menunjukan bahwa masalah ini telah diakui oleh berbagai peneliti dan penting untuk ditangani (Fani, 2033; Cindie, 2023; Mufidatun, 2024; Arif, 2020). Dari sisi akuntabilitas, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan keandalan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola dana bantuan. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki proses verifikasi dan validasi data penerima PKH agar bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

Fenomena penyaluran dana PKH yang tidak tepat sasaran atau diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria layak angkat karena mencerminkan masalah mendasar dalam efektivitas program tersebut. PKH dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, sehingga kesalahan dalam penyaluran dana dapat merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan. Ketidaktepatan ini tidak hanya mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program tersebut, serta menciptakan ketidakadilan sosial.

Penelitian terhadap fenomena ini sangat penting karena mengungkapkan

kelemahan dalam sistem informasi akuntansi dan mekanisme pengawasan yang digunakan dalam pengelolaan dana PKH. Dengan menganalisis kasus-kasus ini dari perspektif syariah, penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyaluran dana. Ini akan memastikan bahwa program PKH lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat optimal kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam syariah.

Pendekatan prinsip syariah dalam analisis transparansi penerimaan dana PKH ini juga sangat penting karena prinsip yang menekankan transparansi, keadilan, amanah dan kejujuran dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai etika Islam yang menolak praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang semuanya dapat mengarah pada ketidaksesuaian. Dengan menerapkan prinsip syariah, pengelolaan dana PKH dapat lebih akuntabel dan terpercaya, karena setiap langkah dalam sistem informasi akuntansi akan diawasi ketat sesuai dengan prinsip ini yang mengedepankan tanggung jawab. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong keterlibatan komunitas dalam pengawasan, sehingga mengurangi peluang terjadinya ketidaksesuaian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial ini (Mulawarman et al., 2011)

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena yang di temukan penelitian ini masih harus di teliti lagi sejauh mana system informasi akuntansi penyaluran dana ini dan bagaimana perspektif amanah, maka penulis membuat proposal skripsi dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pungutan Dana PKH dari Perspektif Syariah (Studi Kualitatif di Kecamatan Cireunghas)”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pungutan dana PKH di Kecamatan Cireunghas ditinjau dari perspektif syariah

1.3 Batasan Masalah

Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas terkait

penerapan sistem informasi akuntansi PKH, akuntabilitas PKH dengan kesesuaian prinsip prinsip syariah

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pungutan dana PKH di Kecamatan Cireunghas berdasarkan prinsip syariah

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

- a) Di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan khususnya ilmu akuntansi yang berbasis syariah dan juga system informasi akuntansi.
- b) Penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dan referensi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai system informasi akuntansi dan prinsip syariah.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tolak ukur bagi lembaga mengenai penerapan prinsip syariah dan bagaimana system informasi akuntansinya.



1.5.2 Secara Praktis

- a) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, transparansi penggunaan dana PKH dapat ditingkatkan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.
- b) Peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah: Dengan menerapkan pendekatan Prinsip syariah, penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan dana PKH sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan keadilan dalam distribusi dana.
- c) Peningkatan efisiensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dapat mempermudah pengelolaan dan pelaporan dana PKH, mengurangi beban administrasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia.

1.6 Sistematika Penulisan

Merupakan upaya untuk memudahkan pembaca menikmati alur laporan yang disajikan oleh peneliti. Sistematika penulisan ini adalah:

a.) BAB 1 Pendahuluan

Latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b.) BAB II Tinjauan Pustaka

Mendeskripsikan kajian teoritis yang digunakan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang sesuai dengan permasalahan dari penelitian.

c.) BAB III Metode Penelitian

Rancangan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas data, tahap-tahap penelitian.

d.) BAB IV Hasil dan Pembahasan

Mendeskripsikan gambaran objek penelitian, hasil temuan penelitian beserta analisis dan pembahasan.

e.) BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran.





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cireunghas mencakup beberapa aspek penting yang saling terkait yaitu:

1. Program PKH di Kecamatan Cireunghas

Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin dengan memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama dalam pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaan program di Kecamatan Cireunghas menghadapi berbagai tantangan. Sistem pengelolaan yang masih menggunakan metode manual dan kurangnya transparansi dalam pencatatan dan pelaporan menghambat efektivitas program. Proses manual ini membuat program rentan terhadap kesalahan dan ketidaktepatan dalam penyaluran dana, yang mengurangi dampak positif yang diharapkan.

2. Tingkat Transparansi dalam Penerimaan Dana PKH melalui Sistem Informasi Akuntansi

Kesimpulan dari pembahasan mengenai tingkat transparansi dalam penerimaan dana PKH melalui sistem informasi akuntansi adalah bahwa meskipun sistem informasi akuntansi sudah diterapkan dalam pengelolaan dana PKH, tingkat transparansi masih perlu ditingkatkan. Transparansi yang optimal belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kendala seperti integritas data yang belum terjamin, keterbatasan akses informasi bagi pihak-pihak tertentu, serta kurangnya pelaporan yang jelas dan detail kepada publik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya peningkatan kualitas data, pengecekan yang lebih ketat, dan pengembangan mekanisme akses informasi yang lebih luas dan mudah, sehingga transparansi dalam penerimaan dan penyaluran dana PKH dapat lebih terjamin dan akuntabel.

3. Penerapan Prinsip syariah untuk Mencegah Ketidaksesuaian dalam

Penerimaan Dana PKH

Kesimpulan dari pembahasan mengenai penerapan prinsip syariah untuk mencegah ketidaksesuaian dalam penerimaan dana PKH adalah bahwa prinsip syariah, yang mengedepankan tanggung jawab, kejujuran, dan integritas, merupakan kunci penting dalam memastikan pengelolaan dana PKH yang efektif dan sesuai dengan tujuan. Penerapan prinsip ini dapat mencegah ketidaksesuaian seperti manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang melalui pengawasan ketat, penguatan pengecekan internal, dan penegakan sanksi. Selain itu, prinsip syariah juga mendorong keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahap penerimaan dan penyaluran dana, sehingga dana PKH dapat disalurkan dengan lebih adil dan tepat sasaran.

4. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Syariah yang dapat Meningkatkan Akuntabilitas Dana PKH

Kesimpulannya, penerapan sistem informasi syariah yang berbasis teknologi terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dana Program Keluarga Harapan (PKH). Sistem ini harus memastikan pencatatan dan pelaporan transaksi dilakukan secara real-time dan otomatis, meminimalkan risiko kesalahan dan manipulasi data. Transparansi dalam sistem memungkinkan semua data keuangan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mendukung prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan dana sesuai dengan syariah.

Selain itu, fitur pengawasan dan pelaporan yang efektif dalam sistem informasi syariah memainkan peran kunci dalam mendeteksi dan mencegah ketidaksesuaian. Dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan laporan keuangan yang detail dan otomatis, proses pengecekan dan evaluasi dapat dilakukan lebih mudah dan efisien. Ini memastikan bahwa dana PKH dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan publik terhadap program tersebut. Secara keseluruhan, sistem ini membantu PKH mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan lebih efektif, adil, dan transparan.

5. Mekanisme Ketidaksesuaian

Mekanisme ketidaksesuaian dalam PKH di Kecamatan Cireunghas termasuk manipulasi data dan penyalahgunaan dana. Hal ini sering kali disebabkan oleh sistem pengelolaan yang tidak terintegrasi dengan baik dan kurangnya transparansi. Proses manual dan pencatatan yang tidak akurat membuka peluang bagi ketidaksesuaian seperti pemotongan dana dan penyaluran yang tidak sesuai, yang mengurangi efektivitas program dan merugikan penerima manfaat.

6. Prinsip Syariah

Penerapan prinsip syariah seperti keadilan, kebenaran, transparansi, dan kepercayaan dalam PKH belum sepenuhnya dilaksanakan. Sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip tersebut, yang berdampak pada efektivitas dan integritas program. Penerapan prinsip-prinsip syariah secara lebih konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

7. Akuntabilitas Dana PKH

Akuntabilitas dana PKH di Kecamatan Cireunghas masih kurang memadai. Sistem pengelolaan yang manual, pengawasan yang lemah, dan pengecekan yang tidak rutin menghambat kemampuan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan program. Untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu dilakukan penerapan teknologi canggih, seperti blockchain, yang dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah verifikasi transaksi. Selain itu, pelatihan rutin bagi petugas dan penerima manfaat tentang pentingnya akuntabilitas dan prosedur pelaporan ketidaksesuaian harus diperkuat. Penguatan pengawasan dan pengecekan rutin serta penegakan sanksi tegas bagi pelanggar juga penting untuk memastikan dana PKH dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat miskin.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cireunghas, diperlukan reformasi dalam sistem pengelolaan, penerapan prinsip-prinsip prinsip syariah, serta penguatan pengawasan dan pengecekan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program

dapat berjalan lebih efektif, memastikan bantuan disalurkan dengan tepat, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap program serta pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cireunghas, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan akuntabilitas:

1. Penerapan Sistem Digital dan Teknologi Canggih

Untuk mengurangi ketidaktepatan dan manipulasi data, disarankan untuk mengadopsi sistem digital yang lebih canggih, seperti teknologi blockchain, yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan data. Sistem digital juga mempermudah pencatatan, pelaporan, dan verifikasi transaksi secara real-time, mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian dan kesalahan dalam pengelolaan dana.

2. Penguatan Pengawasan dan Pengecekan

Penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pengecekan agar ketidaksesuaian dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat. Ini termasuk melakukan pengecekan rutin dan berkala yang melibatkan pengecekanor independen untuk memastikan akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana PKH. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi petugas mengenai standar akuntabilitas dan prosedur pengecekan dapat membantu memperbaiki proses pengawasan.

3. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah

Untuk memastikan bahwa PKH mematuhi prinsip-prinsip prinsip syariah, seperti keadilan, kebenaran, transparansi, dan kepercayaan, disarankan untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dapat melibatkan revisi prosedur operasional, pelatihan mengenai prinsip syariah bagi petugas, dan penerapan mekanisme pelaporan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

4. Peningkatan Keterlibatan dan Edukasi Penerima Manfaat

Memberikan edukasi kepada penerima manfaat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program PKH serta cara melaporkan ketidaksesuaian sangat

penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau sosialisasi yang melibatkan penerima manfaat secara langsung, sehingga mereka lebih memahami cara memanfaatkan bantuan dan melaporkan masalah jika terjadi penyimpangan.

5. Penegakan Sanksi Tegas

Untuk mencegah ketidaksesuaian dan penyalahgunaan dana, perlu adanya penegakan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan ketidaksesuaian. Sanksi ini harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (1 ed.; P. Rapanna, Ed.). Makassar: CV Syakir Media Press.
- Akhira Rahmadhani, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Ppkh Kampung Pisang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam)" (Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2021), 25.
- Alfian, A., & Baridwan, A. (2020). Pengaruh Presentase Komisaris Independen Terhadap Pergantian Pengecekanor Eksternal Perspektif Fraud Triangle Theory. *Jurnal STIE Semarang*, 12(3), 126–134. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Ambarwati, Muji Sulistyowati. 2014. Hubungan antara Niat Peserta dengan Implementasi Komitmen Program Keluarga Harapan Komponen Kesehatan. *Jurnal Promkes* Vol. 2 No. 1. Juli 2014 hlm. 1-14 <http://www.jurnal.unair.ac.id/filerPDF/jupromkesb684d4a347full.pdf> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Amran, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Secara Merata Kepada Masyarakat. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jtp.v2i1.7715>
- Annur, Reza Attabiuurrobbi. 2013. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2013. *EDAJ* 2 (3) hlm: 409-426) <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> (diunduh pada 5 Maret 2019)
- Ansori, Sonni. 2010. Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2009).

[http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/23959/0%20\(79\).pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/23959/0%20(79).pdf?sequence=1) (diunduh pada 6 Pebruari 2019)

Antara news, *efektifitas penyaluran masih jadi tantangan program keluarga harpan* 2019, <https://m.antaranews.com/berita/1145562/efektivitas-penyaluran-masih-jadi-tantangan-program-keluarga-harapan>

Aries, Muhammad. Hardinsyah dan H Tuhiman. 2012. Determinan Gizi Kurang dan Stunting Anak Umur 0-36 bulan Berdasarkan Data Program Keluarga Harapan (PKH) 2007. Jurnal Gizi dan Pangan Vol. 7 (1) Maret 2012 hlm. 19-26 <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/ketahanan.pdf> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)

Astuti, Erli Widhi. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus di Kabupaten Semarang). EDAJ 7 (2) hlm: 162:185 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> (diunduh pada 5 Maret 2019)

Demografi, Sosial, dan Ekonomi Keluarga

Dinas social, *Program Keluarga Harapan (PKH)* Jakarta.co.id 2024, <https://www.jakarta.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

Faujan Otinu dkk, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Pada Toko Campladean Manado,” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12 No. 1 (2017): 169, <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17202.2017>.

Hulfi Kurnia Putri Fitrotul Kamila, *Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang)*” (Skripsi, Universitas Jember, 2022), 31.

Irma Paramita Sofia, “Modul Sistem Informasi Akuntansi” (Skripsi, Universitas Pembangunan Jaya, 2018), 3.

Keluarga Harapan (PKH). Jur. Ilmu Kelu.

Kemensos, “Program Keluarga Harapan (PKH)” [kemensos.co.id](http://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh) 2019, <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

- Kurniawati, I. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Tgas Akhir (D3), 7, 9–25.
- Lisabella, M. (2013). Model Analisis Interaktif Miles and Huberman. Universitas Bina Darma, 3.
- Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Menuju Teori Prinsip syariah Baru. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(1), 61–78. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art4>
- PPM SoM 2023, Sistem Informasi Akuntansi: Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Komponen <https://ppmschool.ac.id/sistem-informasi-akuntansi/#:~:text=Mendukung%20Pengambilan%20Keputusan%20yang%20Tepat,membuat%20keputusan%20yang%20lebih%20baik>
- Redaksi OCBC NISP Fraud: Jenis, Penyebab, Cara Mendeteksi & Cara , 2023, Mencegahnya <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/23/fraud-adalah>
- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2022). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Propinsi Lampung)*. Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 3(1), 64–84. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2007. Teori Sosiologi Modern. Terjemahan Alimadan Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ritzer, George & Smart, Berry. 2014. Handbook Teori Sosial. Terjemahan Imam Muttaqien, Derta Sri W., dan Waluyati: Bandung: Nusa Media
- Rufaida Azizah, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Pelaksanaan Keluarga Harapan (PPKH) di Kecamatan Pagelaran” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, tidak diterbitkan, 2018), 17-18.

Rys, Vladimir. 2011. Merumus Ulang Jaminan Sosial Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar. Jakarta: PT Pustaka Alfabet

Simanjuntak, Megawati. H Puspitawati dan MD Djamaludin 2010. Karakteristik

Siti Fatimah, “penyaluran dana bansos disunat bikin geger sukabumi” detik.com 2023, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6912944/penyaluran-bansos-disunat-rp-50-ribu-bikin-geger-sukabumi/amp>

Syamsir, Nurfahira. 2014. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/155/article%20asti%20respita.pdf?sequence=1> (diunduh pada 6 Februari 2019)

Tijjani, Maaruf. 2014. Poverty Alleviation in Nigeria: a Review of Programmes and a Way Forward. KUTEJ: a Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 5. 2 July 2014 pp: 150-169 <http://www.academia.edu/download/32175767/epw-gc.pdf>



CURRICULUM VITAE

Nama : Chitra Nur Risyanti

NIM 20200070068

Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 18 April 2002

Alamat : Cimahpar blk Kantor pos Rt 003 Rw 015, Sukaraja,
Sukabumi, Jawa Barat

Pendidikan :

1. Assobariah
2. SDN Cibeureum Hilir 5
3. SMPN 5 Kota Sukabumi
4. SMAN 1 Sukaraja
5. Universitas Nusa Putra

Judul Skripsi : "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pungutan Dana PKH dari Perspektif Syariah (Studi Kualitatif di Kecamatan Cireunghas)"

